

PENETAPAN SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMILU BERINTEGRITAS

Oleh:

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti ¹

E-mail: ayujatiana@uhnsugriwa.ac.id

Dosen Jurusan Hukum, Fakultas Dharma Duta
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Abstract

The implementation of the regional head general election in the context of the election of the Regent and Deputy Regent in Badung Regency in 2020 then recorded the first history in the implementation of the regional head general election simultaneously in Bali Province, namely the determination of one candidate pair as the only participant participating in the regional head general election held in Badung Regency in 2020. This is certainly interesting to analyze so that in this paper it will be analyzed and described the relationship between elections with integrity and the determination of a single candidate in the general election for the regional head of Badung Regency in the simultaneous regional head elections in 2020. This writing uses normative legal research methods. Where in this paper, we use statutory studies and literature to analyze the determination of a single candidate in the regional head elections in Badung Regency in the context of the election of the Regent and Deputy Regent in 2020. The results of the analysis carried out were the determination of one candidate pair in the general election of the Regent and Deputy Regent in Badung Regency by the KPU of Badung Regency has been following the basic legal provisions of the implementation of regional head elections and the determination of one candidate pair in the regional head general election for the election of regents and deputy regents in Badung Regency in 2020 and has fulfilled the principles of elections with integrity, namely the general election of the head regions must continue to be implemented even though there is only one pair of participants participating in the regional head election competition so that the political rights of citizens to be able to elect their leaders based on the principles of democracy are fulfilled the elected leader is expected to be able to carry out the task us and its obligation to prosper and protect its people.

Keywords: *Election for regional heads, Election with Integrity, One Candidate Pair, Democracy*

Abstrak

Pelaksanaan pilkada dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Badung Tahun 2020 lalu mencatat sejarah pertama dalam pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Bali yaitu penetapan satu pasangan calon sebagai satu-satunya peserta yang berpartisipasi dalam pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Badung pada Tahun 2020 lalu. Hal ini tentu menarik untuk dianalisis sehingga dalam tulisan ini akan dianalisis dan dideskripsikan mengenai hubungan antara pemilu berintegritas dengan penetapan calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Badung dalam pilkada serentak tahun 2020 yang lalu. Penulisan ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana dalam penulisan ini menggunakan studi perundangan dan kepustakaan untuk menganalisis penetapan calon tunggal dalam pilkada di Kabupaten Badung dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Hasil dari analisis yang dilakukan maka penetapan satu pasangan calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Badung oleh KPU Kabupaten Badung telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar hukum pelaksanaan pilkada dan penetapan satu pasangan calon dalam Pilkada untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Badung tahun 2020 lalu telah memenuhi prinsip pemilu berintegritas yakni pilkada harus tetap dilaksanakan walaupun hanya ada satu pasangan peserta yang mengikuti kompetisi pilkada sehingga hak asasi politik warga negara untuk dapat memilih pemimpinnya berdasarkan pada asas demokrasi terpenuhi pemimpin yang terpilih diharapkan mampu mengemban tugas dan kewajibannya untuk mensejahterakan serta dapat mengayomi rakyatnya.

Kata Kunci : Pilkada, Pemilu Berintegritas, Satu Pasangan Calon, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) selalu tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi dan demokratisasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos/cratein* yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi pertama kali diungkapkan oleh Herodotus bahwa dimana kekuasaan (*demos*) haruslah berdasarkan *isomania* atau persamaan hukum kemudian hal itu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan waktu dan tempat dimana politik berjalan (Affan Gaffar, 2004).

Demokrasi dapat dikatakan sebagai penuntun yang penting dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia sehingga kekuasaan negara yang diperoleh memang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat maka dalam hal ini demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan

berdasarkan pada asas persamaan serta kesederajatan manusia dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada hukum dan demokrasi. Demokratisasi berkaitan dengan transisi demokrasi yaitu perubahan politik yang bergerak ke arah demokratis. Transisi adalah permulaan atau rentang waktu perubahan dari rezim yang bersifat otoriter menjadi rezim yang bersifat demokrasi. Transisi demokrasi merupakan proses untuk mencapai demokratisasi secara maksimal yaitu konsolidasi demokrasi sehingga transisi demokrasi adalah bagian dari proses demokratisasi. Maka dalam hal ini demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi sehingga demokratisasi berkaitan dengan transisi dan strategi untuk mencapai demokrasi (Anders Uhlin, 1998). Dihubungkan dengan pemilu maka pemilu merupakan hasil dari pemahaman terhadap demokrasi yang paling substansial. Pemilu bersifat adil dan terbuka serta merupakan salah satu kebutuhan pemerintah dalam melegitimasi kekuasaannya. Di samping itu pula, pemilu merupakan

sarana rakyat dalam mewujudkan hak nya dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep demokrasi dan pemilu tidak saling mengartikan satu sama lain namun kedua konsep tersebut saling terkait dan terhubung satu sama lain yaitu dengan adanya pemilu yang bersifat adil, terbuka, langsung, jujur dan kompetitif tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut dipandang sebagai salah satu ciri penting yang menetapkan suatu negara sebagai negara yang demokratis.

Pemilu dalam lingkup pemilihan kepala daerah (selanjutnya disingkat Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung sehingga rakyatlah yang memilih langsung pemimpinnya diawali berdasarkan pada penyempurnaan Pasal 18 UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000. Pilkada yang diselenggarakan secara langsung dapat dikatakan sebagai sebuah perkembangan baru dalam pemahaman makna dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Tentunya hal tersebut merupakan salah satu wujud dari tuntutan rakyat di era reformasi agar adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kemudian demokratisasi diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pilkada secara langsung (M.Noor Azis,2011). Melihat hal itu maka pilkada secara langsung merupakan refleksi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat di daerah sebagaimana inti dari demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Pilkada secara langsung diyakini sebagai jalan demokrasi dalam

menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah sekian lama rakyat terkungkung dalam era orde baru yang tidak pernah menggunakan sistem demokrasi sehingga rakyat tidak dapat menentukan pemimpin dan wakil nya secara langsung sehingga pilkada merupakan wujud nyata responabilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih harus bertanggung jawab langsung terhadap rakyatnya.

Lika-liku perjalanan panjang pelaksanaan pemilu di Indonesia khususnya pilkada sebagai bentuk mengeksistensikan demokrasi terutama setelah beralihnya kepemimpinan era orde baru yang bertatanan otoriter menjadi era reformasi yang bertatanan politik terbuka menjadi batu loncatan dimulainya perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan bentuk paling nyata demokrasi yang diwujudkan setelah masa peralihan tersebut. Perjalanan pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak semulus yang terlihat, selalu ada permasalahan teknis yang muncul di setiap penyelenggaraan pemilu khususnya dalam pelaksanaan pilkada. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk perubahan sosial yang ada di setiap pelaksanaan pemilu. Salah satu hasil dari perubahan sosial tersebut adalah perubahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang perubahannya ditetapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada 2016) khususnya perubahan yang terlihat terdapat dalam Pasal 54 UU Pilkada yang ditambahkan beberapa Pasal tambahan yaitu Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C dan Pasal 54D.

Perubahan yang paling menonjol adalah ketentuan Pasal 54C UU Pilkada tentang penetapan pasangan calon tunggal atau satu pasangan calon dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54C. Penetapan calon tunggal tentunya harus melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh UU Pilkada dan tidak melanggar prinsip serta asas pemilu. Tentunya itu terkait dengan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Integritas merupakan hal penting yang harus ada dalam setiap pelaksanaan pemilu khususnya pilkada karena dengan adanya integritas maka penyelenggaraan pemilu akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Hal tersebut juga terlihat dalam penetapan calon pasangan tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada penyelenggaraan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang lalu. Maka dalam tulisan ini akan menganalisis mengenai hubungan antara pemilu berintegritas dengan penetapan calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Badung sehingga penetapan calon tunggal tersebut disebut sebagai implementasi pemilu berintegritas dalam pilkada serentak tahun 2020 yang lalu.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana dalam penulisan ini menggunakan studi perundangan dan kepustakaan untuk menganalisis penetapan calon tunggal dalam pilkada di Kabupaten Badung dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

PEMBAHASAN

1. Pemilu Berintegritas

Pemilihan umum kepala daerah atau disingkat dengan Pilkada secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yaitu sebagai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Penyelenggaraan pilkada merupakan bentuk dari demokrasi dalam artian sempit sebagaimana dirumuskan oleh Joseph Schumpeter sebagaimana dikutip oleh Held (David Held, 1998) mengatakan bahwa demokrasi dalam artian sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik dimana warga negaranya diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk memperoleh suara kemudian di antara pemilihan tersebut keputusan diambil oleh politisi dan di pemilihan berikutnya warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan warga negara dalam memilih pemimpin mana yang pantas untuk menjadi wakil mereka di antara

kandidat pemimpin-pemimpin politik lainnya dalam masa pemilihan inilah yang disebut sebagai demokrasi.

Demokrasi dalam arti sempit juga dijelaskan oleh Robert Dahl yang menyatakan bahwa dalam berbagai pemaknaan yang berbeda mengenai demokrasi, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh proses pemerintahan supaya seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang menurut Dahl ada lima kriteria antara lain (Robert Dahl, 2001): a. Partisipasi efektif; b. Persamaan suara; c. Pemahaman yang cerah; d. Pengawasan agenda; e. Pencakupan orang dewasa. Maka dalam hal ini demokrasi memberikan berbagai kesempatan untuk hal tersebut. Lebih lanjut, saat demokrasi diartikan sebagai suatu kompetensi, partisipasi dan kebebasan maka itu dapat disebut proses demokratisasi perubahan sistem politik dari bentuk non-demokratis ke bentuk yang lebih demokratis. Dahl pun mengidentifikasi dua jalan penting menuju demokrasi yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Lima kriteria yang diungkapkan Dahl tersebut mencakup dimensi penting dalam sistem politik demokrasi yang ideal yakni kompetisi, partisipasi serta kebebasan politik dan sipil. Pilkada di Indonesia termasuk wujud dari bentuk demokrasi yang terfokus pada partisipasi hal tersebut dapat dilihat dari asas pelaksanaan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu khususnya pilkada di Indonesia dilihat dari seberapa besar partisipasi warga negara yang datang pada hari pemungutan suara untuk memberikan hak pilihnya serta jumlah suara yang diberikan oleh warga negara sangat

menentukan pemimpin yang terpilih berikutnya.

Pemilihan dilakukan secara demokratis maksudnya rakyat diberikan kebebasan untuk memenuhi hak politiknya dengan berpartisipasi dalam hal memilih pemimpin atau perwakilannya dalam suatu pemilu. Apabila partisipasi rakyat semakin tinggi, dalam memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya, maupun dalam menentukan arah kebijakan publik dan rakyat mempunyai akses untuk menentukan siapa yang sepatutnya memerintah mereka, apa yang dilakukan serta menilai keberhasilannya dan kegagalannya maka suatu pemerintahan dapat disebut sebagai pemerintahan demokrasi. Begitu pula dengan pelaksanaan pemilu apabila semakin tinggi partisipasi rakyat dan semua rakyat mau menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin selanjutnya maka pemilu tersebut merupakan pemilu yang demokratis. Di samping itu, pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan cerminan dari pemilu secara demokratis yang memberikan keuntungan bagi rakyat seperti misalnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada serentak 9 desember 2020 lalu menunjukkan adanya konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mekanisme pemilihan pejabat publik sekaligus juga merupakan proses politik untuk menuju pada kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.

Rakyat sebagai warga negara yang mengikuti pilkada secara langsung otomatis mendapatkan pendidikan politik serta akan memahami tujuan untuk apa pilkada dilakukan secara langsung diselenggarakan sehingga mereka semakin kritis dalam menuntut hak-

haknya sebagai warga negara. Selain bagi rakyat, pilkada yang dilakukan secara langsung juga mendorong pendewasaan para partai politik terutama dalam perekrutan kader-kader partai politik yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah di pilkada berikutnya. Dapat dikatakan disini bahwa pilkada yang dilakukan secara demokratis dan langsung merupakan seleksi dalam menentukan kepemimpinan lokal yang ideal untuk mendapatkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas, berjiwa Pancasila dan demokrasi serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai pemimpin daerah yang membangun wilayah sekaligus mengayomi rakyatnya. Diharapkan juga seorang pejabat publik yang memperoleh dukungan luas dan kuat dari rakyatnya akan merasa terikat dengan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat serta menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam rangka tercapainya tujuan negara pada tingkat lokal.

Salah satu prinsip penyelenggaraan pilkada yang demokratis adalah pemilu berintegritas. Pemilu berintegritas harus berlandaskan pada asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan enam indikator pemilu berintegritas sekaligus mencerminkan pemilu demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam lingkup pilkada yang dilaksanakan dengan calon tunggal sebagaimana pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten badung tahun 2020 lalu dapat dipertanyakan pilkada yang diselenggarakan tersebut sudah atau belum memenuhi prinsip pemilu berintegritas. Dalam hal berkompetisi tentu harus ada

pesaingnya yang sama-sama merupakan calon yang diajukan oleh partai politik namun kenyataannya calon tunggal tersebut melawan kolom kosong sebagai pesaing calon tunggal tersebut. Dapat dilihat pula pemenuhan asas keadilan juga patut dipertanyakan seperti misalnya pelaksanaan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) agak sukar dalam memberikan hak dan porsi yang sama bagi calon tunggal dan kolom kosong secara berkeadilan serta menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) dalam mengawasi hal ini terlebih agar keadilan dapat tercermin baik bagi calon tunggal maupun bagi kolom kosong itu sendiri (M.Rezky Habibi R,2020).

Mengenai konsep pemilu berintegritas, disini menggunakan konsep electoral integrity (selanjutnya disebut pemilu berintegritas) oleh Global Commission On Elections, Democracy, & Security yang dipaparkan oleh Kofi A.Annan dalam laporan Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide dan Pippa Norris dalam bukunya berjudul Why Electoral Integrity Matters. Pemilu berintegritas laporan Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide, dijelaskan mengenai pengertian pemilu berintegritas adalah garis besar yang dimaksud electoral integrity atau pemilu berintegritas adalah "...we define an election with integrity as any election that is based on the democratic principles of universal suffrage and political equality as reflected in international standards and agreements, and is professional, impartial, and transparent in its

preparation and administration throughout the electoral cycle.” Secara garis besar, pengertian pemilu berintegritas menurut Koffi A. Annan tersebut memberikan pengertian bahwa pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak asasi manusia secara universal khususnya hak sipil dan politik dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan deklarasi hak asasi manusia internasional, profesional, netral dan transparan dalam persiapan sampai penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut lagi bahwa pemilu berintegritas merupakan cerminan dari demokrasi dan menegakkan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi karena ketika pemilu tidak berintegritas maka badan-badan penyelenggara pemilu tidak bertanggung jawab pada rakyat dan kandidat politik, serta rakyat sebagai pemilik hak suara akan menolak berpartisipasi serta mengganggu proses perpolitikan di Indonesia. Selain itu, rakyat akan tidak percaya lagi pada proses demokrasi ketika pemilu yang diselenggarakan tidak inklusif, transparan dan dipertanggungjawabkan. Disinilah peran integritas sangat besar dan penting karena ketika pemilu berintegritas maka akan menjalankan prinsip demokrasi, menghargai hak-hak sipil dan politik dan menghasilkan pemimpin maupun perwakilan yang kemungkinan besar mewakili kepentingan warga negara yang memilihnya.

Pippa Norris memberikan pengertian terhadap pemilu berintegritas yaitu “As conceptualized and defined by this volume, the overarching notion of electoral integrity refers to agreed upon international conventions and universal standards about elections reflecting global norms

applying to all countries worldwide throughout the electoral cycle, including during the pre-electoral period, the campaign, on polling day, and its aftermath”. Pippa Norris mendefinisikan pemilu berintegritas secara luas yaitu mengacu pada konvensi internasional yang disepakati dan standar universal tentang pemilu yang di dalamnya terkandung norma-norma internasional yang berlaku untuk semua negara di seluruh dunia yang berisikan tentang siklus pemilu, periode pra-pemilu, kampanye, hari pemungutan suara dan penghitungan suara, dan setelah selesainya penyelenggaraan pemilu.

Menyambung dengan konsep dari Pippa Norris, yang menjadi acuan dalam menentukan pemilu berintegritas dapat menggunakan Kesepakatan Electoral Transparency : Eight Keys to Integrity yang merupakan kesepakatan hasil dari Konferensi Asian Electoral Stakeholder Forum yang diselenggarakan di Kuta, Provinsi Bali pada Agustus 2016. Isi dari kesepakatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Transparent EMB's: The laws and procedures for appointment of EMB members and the operation of EMBs must be clearly written. The public must be able to observe all aspects of EMB operations.
- b. Transparent campaign fundraising: Laws and regulations must require full and timely disclosure of the sources of all monies raised by candidates, political parties and independent groups seeking to influence the outcomes of referenda and/or electoral campaigns for office.
- c. Transparent campaign spending: Laws and regulations must require full and timely disclosure of the use

- of all monies raised by candidates, political parties and independent groups seeking to influence the outcomes of campaigns for political office and/or referenda.
- d. Transparent public access to campaign finances: The public must have full internet access to EMB files containing campaign finance data, with all files maintained in a form which can be readily analyzed by any member of the public with basic computer skills.
 - e. Transparent voter registration: The process by which the voter list is compiled, checked, updated and maintained must be open to observation by the public. Full internet access to the voter registration list, including corrections on a real-time basis, must be guaranteed to the public.
 - f. Transparent observation: National and international election observers must be free to observe all parts of the election process, including but not limited to, advance voting, polling on election day, vote tabulation, and all other functions discussed in the "Eight Keys to Integrity".
 - g. Transparent election results: An announcement at each polling station of the results of the voting at that polling station must be made on the same day that voting is held, followed by prompt posting of all results on the EMB's web site.
 - h. Transparent election complaint process: There must be widespread dissemination of the procedures for filing complaints of election violations, followed by the ability of the public to access complaints shortly after they are filed and to be apprised promptly of the disposition of each complaint.

Secara singkat ke delapan kunci tersebut diatas terdiri dari transparan dalam pembentukan dan penetapan tugas Badan Penyelenggara Pemilu, transparan dalam penggalan dana kampanye, transparan dalam pembiayaan kampanye, transparan dalam memberikan akses publik atas dana kampanye, Transparan dalam pendaftaran pemilih, Hasil pemilu yang transparan dan proses pengaduan pemilu yang transparan.

Berdasarkan uraian pengertian-pengertian pemilu berintegritas di atas secara sederhana pengertian pemilu berintegritas adalah pemilu yang dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas pemilu yang demokratis dan penyelenggaraannya bertujuan untuk memenuhi hak sipil dan politik warga negara dalam menentukan pemimpin serta perwakilannya yang terbaik sehingga dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat.

2. Penetapan Satu Pasangan Calon Sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi Pemilu Berintegritas

Berdasarkan dari pengertian-pengertian pemilu berintegritas di atas maka pemilu berintegritas merupakan pemilu yang diselenggarakan pada prinsip pemilu demokratis dengan berlandaskan pada asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas pemilu tersebut merupakan indikator dalam mengukur penyelenggaraan pemilu khususnya pilkada telah memenuhi prinsip pemilu berintegritas atau belum. Penetapan calon tunggal di Pilkada Kabupaten Badung dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati sekilas terlihat tidak mencerminkan prinsip demokratis dan pemilu berintegritas karena dalam pilkada setidaknya minimal ada dua pasangan calon yang harus berkompetisi dalam

perhelatan pilkada tersebut namun hanya ada satu calon pasangan tunggal yang ditetapkan sebagai peserta oleh KPU Kabupaten Badung dalam pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Penetapan calon tunggal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung keabsahannya dapat dilihat dari dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam penetapannya. Berdasarkan perubahan kedua UU Pilkada maka pengaturan penetapan calon tunggal diatur dalam Pasal 54C. Adapun ketentuan Pasal 54C UU Pilkada memuat tentang:

a. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- 1) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- 2) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- 3) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

- 4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - 5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- b. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- c. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

Menindaklanjuti Pasal 54C UU Pilkada tersebut maka KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut PKPU No.14 Tahun 2015) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

PENETAPAN SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMILU BERINTEGRITAS..... (IGA. Jatiana Manik, 25-36)

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut PKPU Nomor 13 Tahun 2018) sebagai aturan teknis pelaksanaan Pasal 54C tersebut sehingga dalam penetapan calon tunggal di pilkada tahun 2020 menggunakan PKPU No.14 Tahun 2015 sebagai salah satu dasar dalam menetapkan pasangan calon tunggal di pilkada Kabupaten Badung. Penetapan pasangan calon I Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs. I Ketut Suiasa, S.H yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat sebagai satu-satunya peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 atau sebagai pasangan calon tunggal apabila dikaji dengan Pasal 54C UU Pilkada diatas maka telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 54C UU Pilkada serta telah memiliki keabsahan hukum sebagai pasangan calon tunggal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 1678/PL.02.3-Kpt/5103/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

Sebelum penetapan pasangan calon tunggal dilakukan, KPU Badung sudah mengikuti prosedur sebagaimana harusnya. Dimulai dari masa pendaftaran yang diumumkan melalui Pengumuman Nomor: 1450/PL.02.2-Pu/5103/KPU-Kab/VIII/2020, yang mana mencantumkan mengenai syarat pendaftaran bakal pasangan calon dan waktu pelaksanaan pendaftaran yang dimulai dari tanggal 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020 serta mencantumkan ketentuan lainnya. Selama masa pendaftaran

tersebut baru satu bakal pasangan calon yang mendaftar yaitu Bakal Pasangan Calon Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs. I Ketut Suiasa, SH. Sampai masa pendaftaran berakhir hanya ada satu bakal pasangan calon maka KPU Badung memperpanjang masa pendaftaran dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor: 1547/PL.02.2-Pu/5103/KPU-

Kab/IX/2020 yang memperpanjang masa pendaftaran mulai dari tanggal 11 September 2020 sampai dengan 13 September 2020. Hingga masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon berakhir, tidak ada lagi bakal pasangan calon yang mendaftar sehingga diputuskan untuk menetapkan bakal pasangan calon Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs. I Ketut Suiasa, SH sebagai Pasangan Calon Tunggal setelah dilakukan seleksi administrasi, tes kesehatan dan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Badung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan tersebut ditetapkan oleh KPU Badung dalam Surat Keputusan Nomor 1678/PL.02.3-Kpt/5103/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 atas nama I Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs. I Ketut Suiasa, SH diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati badung Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

Transparansi pun terlihat dari cara KPU Kabupaten Badung dalam mengumumkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Badung dan informasi terkait dengan pelaksanaan pilkada

yaitu dengan menggunakan website <https://kpu-badungkab.go.id> termasuk penetapan pasangan calon tunggal yang diumumkan pula di website KPU Badung. Setelah penetapan pasangan I Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs. I Ketut Suiasa, S.H selanjutnya dilakukan pengundian tata letak posisi pasangan calon dimana hal ini berpengaruh pada penempatan foto pasangan calon dalam surat suara. Ditetapkannya satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2020 maka dalam design surat suara akan ada dua kolom yakni satu kolom berisikan kolom kosong dan kolom satu lagi berisikan foto pasangan calon. Dalam hal pemilihan nanti, masyarakat tetap dapat memilih salah satu pilihan pada surat suara sebagaimana pemilihan pada umumnya sehingga pemilih yang memilih kolom kosong dengan cara mencoblos kolom kosong suaranya tetap sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2018. Dalam melakukan kampanye pun, alat peraga kampanye yang dibuat hanya berisikan foto Pasangan Calon Tunggal saja dan pelaksanaan kampanye mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU serta bentuk-bentuk kampanye yang dilaksanakanpun telah sesuai dengan bentuk-bentuk kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) UU Pilkada 2016.

PENUTUP

Penetapan satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Badung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 lalu dapat dikatakan sebagai implementasi prinsip pemilu berintegritas. Hal tersebut dapat dilihat

dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Badung sebelum menetapkan bakal pasangan calon I Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs. I Ketut Suiasa, S.H sebagai satu pasangan calon sekaligus sebagai satu-satunya peserta dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Badung pada Tahun 2020 lalu. Penetapan satu pasangan calon tersebut berdasarkan pada Pasal 54C UU Pilkada 2016, PKPU Nomor 14 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 sehingga penetapan satu pasangan calon tunggal tersebut telah memiliki keabsahan hukum dan sah secara hukum.

Penetapan satu pasangan calon dalam Pilkada untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Badung tahun 2020 lalu memenuhi prinsip pemilu berintegritas yakni pilkada harus tetap dilaksanakan walaupun hanya ada satu pasangan calon sebagai peserta yang mengikuti kompetisi pilkada sehingga hak asasi politik warga negara untuk dapat memilih pemimpinnya berdasarkan pada asas demokrasi terpenuhi dan pemimpin yang terpilih diharapkan mampu mengemban tugas dan kewajibannya untuk mensejahterakan serta dapat mengayomi rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M.Noor (2011). *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional.
- Dahl, Robert (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. diterjemahkan oleh Rahmat Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

PENETAPAN SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMILU BERINTEGRITAS..... (IGA. Jatiana Manik, 25-36)

Gaffar,Affan (2004).*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kofi A.Annan et al (2012), *The Report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security, International Institute for Democracy and Electoral Assistance & Kofi Annan Foundation*. Switzerland.

Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rezky Habibi R, M (2020), Konstitusionalitas Calon Tunggal Di Pilkada, *Jurnal Rechtsvinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.

Uhlin, Anders (1998). *Oposisi Berserak : Arus Deras Demolvasiasi Gelombang Ketiga Di Indonesia*. Jakarta: Mizan.

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan